

BAB IV

PENUTUP

Bab terakhir ini menyajikan beberapa sub bab pembahasan yakni kesimpulan dan saran. Pada sub bab kesimpulan akan menyajikan ringkasan dari seluruh pembahasan yang telah dipaparkan secara rinci pada bab-bab sebelumnya. Selain itu, sub bab saran akan menyajikan terkait rekomendasi-rekomendasi untuk Kerja Sama Indonesia dan Papua Nugini dalam menyelesaikan permasalahan Perbatasan di Muara Tami.

4.1 Kesimpulan

Semenjak adanya masalah perbatasan yang terjadi diwilayah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini, kedua negara berinisiasi untuk melakukan hubungan kerja sama yang dilandasi hubungan bilateral dalam berbagai sektor salah satunya dalam bidang keamanan dan perbatasan. Masalah-masalah yang terjadi diwilayah Muara Tami sebagai contoh pengambilan kebijakan oleh kedua negara untuk menyelesaikan masalah peredaran narkoba, pelintas batas ilegal, penyelundupan, masalah jalan tikus hingga separatisme oleh anggota KKB diwilayah perbatasan Muara Tami. Kerja sama kedua negara ditandai dengan adanya perjanjian *Treaty of Mutual Respect, Cooperation, and Friendship* antara Indonesia dan Papua Nugini, JBC, BLM dan sub teknis lapangan yang mengatur keamanan (dalam bidang militer) dan demarkasi perbatasan. Dengan adanya kerja sama yang dijalin dari tahun 1986 hingga sekarang keberhasilan kedua negara dalam menyelesaikan

masalah perbatasan masih dipertanyakan mengingat angka masalah perbatasan dari tahun ketahun yang masih terus ada dan bertambah.

Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk kerja sama Indonesia dan Papua Nugini dalam menyelesaikan permasalahan perbatasan di Muara Tami. Teori Complex Interdependency milik Joseph Keohane dan Joseph Nye digunakan untuk menjawab pertanyaan dari penelitian. Teori tersebut menjelaskan bahwa kerja sama yang dilakukan oleh para aktor merupakan bentuk jalan keluar untuk mencapai kepentingan nasional maupun penyelesaian suatu permasalahan selain menggunakan kekuatan. Yang mana kerja sama kedua negara menciptakan kondisi dimana kedua negara tersebut berakhir saling bergantung satu sama lain. Teori tersebut memiliki tiga variabel utama dalam penerapan kerja sama yang pertama adalah *Multiple Channels*, yang kedua *Absence of Hierarchy among Issues*, dan yang ketiga *Minor Role of Military Force* yang mana pada penelitian ini penulis hanya berfokus pada *Multiple Channels*. Variabel tersebut menjelaskan bahwa berbagai saluran menghubungkan masyarakat, antara lain: hubungan informal antar elit pemerintahan sekaligus hubungan resmi melalui kantor luar negeri, hubungan informal antar elit non-pemerintah (baik secara langsung tatap muka maupun lewat telekomunikasi) serta organisasi lintas negara (seperti bank multinasional atau perusahaan internasional). Dengan begitu *Multiple Issues* menunjukkan bahwa dalam hubungan antar negara terdapat berbagai persoalan yang muncul, namun tidak selalu berasal dari satu penyebab tunggal. Banyak isu yang dapat memengaruhi kepentingan aktor tertentu tanpa secara langsung mengancam keseluruhan stabilitas negara, sehingga menciptakan sudut

pandang dan kepentingan yang berbeda-beda di antara para aktor, bahkan membentuk kelompok kepentingan yang beragam.

Dalam melihat implementasi kerja sama Indonesia dan Papua Nugini Penulis menggunakan indikator yang dibuat dan didasari oleh landasan variabel *multiple channels*, Adapun empat dimensi indikator *multiple channels* adalah adanya komunikasi antara pemerintah Indonesia dan Papua Nugini, adanya Interaksi Lintas Non Pemerintah (antara LSM, Organisasi Lintas negara), Lembaga riset, Universitas, Entitas Bisnis, dll), adanya Peran Korporasi dan Lembaga keuangan Internasional dan adanya Peran aktor lintas batas negara. Dalam penilaiannya jika seluruh implementasi kerja sama kedua negara memenuhi tiga tingkatan aktor yang berada dalam variabel *multiple channels* yaitu Interstate, Transgovernmental dan Transasional yang menjadi indikator keberhasilan tersebut maka dapat dikatakan berhasil dalam mekanisme penerapannya. Dengan begitu dalam penerapan kerja sama Indonesia dan Papua Nugini dalam bab III dapat disimpulkan bahwa kerja sama tersebut berjalan efektif karena dari kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dan Papua Nugini jika dilihat dari variabel *Multiple Channels* teori *Complex Interdependency* oleh Robert Keohane dan Joseph Nye efektif karena seluruh aktornya terpenuhi dan mengimplementasikan sesuai dengan tugasnya masing-masing.

4.2 Saran

Pada penelitian berjudul “Kerja Sama Indonesia dan Papua Nugini Dalam Menangani Permasalahan Perbatasan di Muara Tami” penulis sangat menyadari terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu, penulis memberikan saran

penelitian berikutnya untuk meneliti dan memperluas cakupan kajian dengan meneliti faktor-faktor lain yang memengaruhi efektivitas kerja sama, seperti peran teknologi pengawasan perbatasan, dampak hubungan masyarakat lintas batas terhadap stabilitas keamanan, serta analisis komparatif dengan wilayah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini lainnya. Penelitian lanjutan juga dapat menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur tingkat efektivitas secara lebih terperinci, sehingga hasilnya dapat menjadi bahan pertimbangan yang lebih kuat bagi perumusan kebijakan bilateral.

